# TINJAUAN ATAS PERAN BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMERIKSAAN KINERJA

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA: IQBAL PRATAMA PUTRA**

**NIM: 126212004**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA**

**2022**

# LAPORAN TUGAS AKHIR

## TINJAUAN ATAS PERAN BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMERIKSAAN KINERJA

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA: IQBAL PRATAMA PUTRA**

**NIM: 126212004**

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA**

**2022**

# TINJAUAN ATAS PERAN BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMERIKSAAN KINERJA

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun Oleh:**

**Iqbal Pratama Putra**
**126212004**

**Disetujui Oleh:**
**Pembimbing**

**Susanto Salim, SE., MM., Ak., CA., CPA., CPMA.**

# ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak hanya dihadapi oleh indonesia, melainkan juga permasalahan yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Dalam rangka menangani permasalahan kemiskinan, pemerintah telah memiliki perencanaan yang tertuang di berbagai dokumen peraturan perundang- undangan. BPK RI sebagai salah satu lambaga tinggi di Indonesia, memiliki peran tersendiri dalam melaksankan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Peran tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPK RI, yaitu melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh BPK RI yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam menilai upaya penanggulangan kemiskinan, BPK RI melaksanakan pemeriksaan jenis kinerja untuk menilai efektivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pemeriksaan kinerja untuk menilai efektivitas penanggulangan kemiskinan pada pemerintah daerah Sulawesi Tengah, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah masih menemukan sejumlah permasalahan, dengan simpulan jika tidak segera dilakukan upaya perbaikan, permasalahan tersebut dapat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.



Kata Kunci: Penanggulangan Kemiskinan; BPK RI; Pemeriksaan Kinerja.



# ABSTRACT

*Poverty is a problem not only faced by Indonesia but also a problem faced by almost all countries in the world. To deal with poverty problems, the government already has a plan that is contained in various statutory regulatory documents. BPK RI as one of the institutions in Indonesia has its role in carrying out efforts to reduce poverty in Indonesia. This role is adapted to the duties and functions of the BPK RI, namely to carry out audits of the management and responsibility of state finances. Audits that can be carried out by BPK RI are financial audits, performance audits, and audits with a specific purpose. In assessing poverty alleviation efforts, BPK RI conducts performance audits to assess the effectiveness of local governments in implementing poverty alleviation efforts. In the performance audit to assess the effectiveness of poverty alleviation in the Central Sulawesi regional, the BPK Representative for Central Sulawesi Province still found several problems, with the conclusion that if improvement efforts were not immediately carried out, these problems could have a significant effect on the effectiveness of poverty alleviation efforts by the Central Sulawesi Provincial Government.*



*Keywords: Poverty alleviation; BPK RI; performance audit*

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Masa Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Susanto Salim, SE., MM., Ak., CA., CPA., CPMA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

# DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... i
HALAMAN JUDUL ..... ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR ..... iii
ABSTRAK ..... iv
KATA PENGANTAR ..... v
DAFTAR ISI ..... vi
DAFTAR TABEL ..... vii
DAFTAR GAMBAR ..... viii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 4
2.1. Penduduk Miskin ..... 4
2.2. Garis Kemiskinan ..... 4
2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan ..... 4
2.4. Indeks keparahan kemiskinan ..... 5
2.5. Pemeriksaan Kinerja ..... 5
BAB III METODE PENELITIAN ..... 7
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 8
4.1. Profil Penanggulangan Kemiskinan Sulawesi Tengah ..... 8
4.2. Proses Bisnis Penanggulangan Kemiskinan ..... 10
4.3. Hasil Pemeriksaan ..... 12
4.4. Rekomendasi Pemeriksaan ..... 20
BAB V PENUTUP ..... 22
DAFTAR PUSTAKA ..... 23

# DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 ..... 8
Tabel 4. 2. Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengentasan Kemiskinan RPJMD 2021-2026 ..... 9

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Proses Bisnis Penanggulangan Kemiskinan Pada Pemerintah Daerah. ..... 11

# BAB I
# PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki tingkat populasi tertinggi di dunia. Berdasarkan hasil sensus yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,2 juta jiwa (BPS, 2022). Berdasarkan berita resmi statistik nomor 51/07/Th.XXV tanggal 15 Juli 2022 tentang profil kemiskinan di Indonesia, persentase penduduk miskin di Indonesia pada Bulan Maret 2022 turun menjadi 9,54%, angka kemiskinan tersebut turun 0,17% jika dibandingkan dengan bulan September 2022 dan turun 0,6% jika dibandingkan dengan bulan Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Bulan Maret 2022 sebesar 9,54% tersebut sama dengan sejumlah 26,16 juta orang. Sebagai gambaran, perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 2011 sampai dengan Bulan Maret 2022 mengalami penurunan baik dari segi jumlah masyarakat miskin dan secara persentase masyarakat miskin, meskipun terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin pada periode 2013 dan 2015 akibat kenaikan bahan bakar minyak dan kenaikan harga barang pokok, dan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pemerintah telah menetapkan rencana untuk mengatasi kemiskinan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang akan diatasi melalui dua strategi utama yaitu melalui penurunan beban berupa pemberian bantuan-bantuan untuk membantu beban masyarakat dan peningkatan pendapatan berupa program-program ekonomi produktif yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup/perekonomian masyarakat miskin karena. Selain berusaha untuk membantu menurunkan beban masyarakat miskin, strategi peningkatan pendapatan penting untuk dilaksanakan pemerintah karena pendapatan yang rendah bukan hanya memengaruhi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat miskin, tetapi juga akan memengaruhi aspek pendidikan dan Kesehatan masyarakat miskin, sehingga akan berimbas kepada produktivitas yang menjadi rendah pula (Kunarjo, 2000). Selain dua strategi utama penanggulangan kemiskinan tersebut, Menurut RPJMN 2020-2024, kebijakan ekonomi makro juga berperan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, indikator-indikator

kebijakan ekonomi makro yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia antara lain pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penyediaan

lapangan kerja, iklim investasi yang kondusif, serta pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal di Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga negara memiliki visi yaitu “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Untuk dapat mencapai visi BPK tersebut, BPK melaksanakan pemeriksaan yang ditujukan untuk mendukung tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh negara, salah satunya yaitu untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengamanatkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dengan begitu, BPK memiliki tiga jenis instrumen pemeriksaan yang dapat digunakan untuk dapat mendukung tujuan pencapaian negara berupa pengentasan kemiskinan.

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan pemeriksaan untuk menilai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah melalui pemeriksaan berupa pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja tersebut memiliki tema/judul yaitu Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah. Tujuan dari pemeriksaan kinerja tersebut adalah untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan yang meliputi kebijakan pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat miskin untuk menanggulangi kemiskinan (BPK RI, 2022).

Dalam karya akhir ini, penulis akan memberikan gambaran tentang peran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya mengatasi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah. Karya Akhir ini merupakan kajian literatur baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori-terori yang terkait, serta Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Peran dan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK penting karena pemeriksaan dan hasil yang disertai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan

Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi masukan/bahan perbaikan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dalam upaya penanggulangan

kemiskinan. Selain itu, pemeriksaan kinerja yang dilakukan tersebut merupakan salah satu implementasi untuk mencapai visi BPK yaitu untuk dapat membantu mencapai tujuan-tujuan negara, dalam hal ini membantu negara untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

# DAFTAR PUSTAKA


Abd Manaf, N. A. 2010. The Impact of Performance Audit: The New Zealand Experience (A thesis: submitted to the Victoria University of Wellington). University of Wellington. Retrieved from http://researcharchive.vuw. ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/1376/ thesis.pdf?sequence=1

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2022. Profil Kemiskinan di Indonesia. Jakarta: Berita Resmi Statistik

BPK RI. 2022. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Palu: BPK RI

Haughton, Jonathan dan Shahidur R. Khanker. 2009. Handbook on Poverty and Inequality. Washington DC: The World Bank

Jeremy Lonsdale, Peter Wilkins, & Tom Ling. 2011. Performance Auditing: Contributing to Accountability in Democratic Government. Northampton: Edward Elgar Publishing Limited.

Kunarjo. 2000. Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan. Jakarta: UI Press.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 2021. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Palu : Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Raaum, R. B., & Morgan, S. L. 2009. Performance auditing : a measurement approach. New York City: Institute of Internal Auditors Research Foundation.

Sahdan, Gregorius. 2005. Menganggulangi Kemiskinan Desa. Artikel-Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan. Yogyakarta.

Simanjuntak, Payaman J. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.

Soemohadiwidjojo, Arini T. 2015. Panduan Praktis Menyusun KPI. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge. 2008. Perilaku Organisasi Edisi 12 Buku 1. Terjemahan: Diana Angelica, Ria Cahyani dan Abdul Rosyid. Jakarta: Salemba Empat.

Sumodiningrat, Gunawan. 1998. Membangun Perekonomian Rakyat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2006). Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2011). Nomor 13 Tahun 2011 tentang tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2010). Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2021). Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2010). Nomor 42 Tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Peraturan Daerah Sulawesi Tengah. (2021). Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.